

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan;

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PD yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2024-2026 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2024-2026;
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2024-2026;
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan;
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan

Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Kota; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron;
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kota sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (output).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPD dan atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen

RPD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja;
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan


BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 25




LAMPIRAN I:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP		➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ➤ Sekretariat Daerah ➤ Inspektorat	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
1.2	Meningkatnya	Indeks Persepsi	Melalui survey pihak eksternal	Inspektorat Daerah	Survey

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	pengelolaan keuangan daerah berkualitas	Anti Korupsi	 <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=U}^n \frac{x_k}{n}$		Penilaian Integritas (SPI) eksternal oleh KPK
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) b) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) d) Penyerapan anggaran (20) e) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; ➤ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; ➤ Dinas Komunikasi dan Informatika; ➤ Inspektorat 	IPKD

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	<div>Penghitungan Indeks<div><div>1. Menentukan nilai untuk setiap indikator<ul style="list-style-type: none">Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$</div><div>2. Menentukan nilai setiap aspek<ul style="list-style-type: none">Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$</div><div>3. Menentukan indeks<ul style="list-style-type: none">Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$</div></div><div><div>Menentukan nilai INDIKATOR</div><div>Menentukan nilai ASPEK</div><div>Menentukan nilai INDEKS</div></div></div> <div>Pembobotan Aspek: a) Kebijakan Pelayanan (30%) b) Profesionalisme SDM (18%) c) Sarana Prasarana (15%) d) Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) e) Konsultasi dan Pengaduan (15%) f) Inovasi (7%)</div>	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB
2	Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	➤ Dinas Pendidikan; ➤ Dinas Kesehatan ➤ Baplitbangda	BPS
		Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	➤ Dinas Sosial ➤ Dinas Ketenagakerjaan ➤ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kepribadian masyarakat	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	Dinas Pendidikan	BPS
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Dinas Kesehatan	BPS
2.3	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Sosial; ➤ Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 	BPS
		Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; ➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; ➤ Dinas Ketahanan Pangan 	BPS
2.4	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Ketenagakerjaan	BPS

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan kualitas perekonomian berkelanjutan berbasis sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	➤ Dinas Pertanian; ➤ Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan; ➤ Dinas PMPTSP ➤ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	BPS
3.1	Meningkatnya kapasitas sektor ekonomi unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P = Kategori Pertanian	Dinas Pertanian	BPS
		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	BPS
		LPE Kategori Jasa	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P = Kategori Jasa mencakup Jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, Jasa Lainnya	➤ Dinas PMPTSP; ➤ Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	BPS

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA						
1	2	3	4	5	6						
3.2	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	Indeks Infrastruktur	<div>Indeks Infrastruktur Tingkat Provinsi = $0,3255 \times jalan + 0,3343 \times air + 0,5133 \times sanitasi + 0,5033 \times pkpl + 0,5153 \times i_kom_inv$ Variabel Indeks Infrastruktur :</div> <table><tr><td>Definisi</td></tr><tr><td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td></tr><tr><td>%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td></tr><tr><td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td></tr><tr><td>Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)</td></tr></table>	Definisi	% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun- x	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun- x	%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun- x	% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN	Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)	<div>➤ Dinas PUTR; ➤ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; ➤ Dinas Perhubungan</div>	Baplitbangda
Definisi											
% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun- x											
% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun- x											
%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun- x											
% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN											
Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)											
3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	$Persentase\ Penurunan\ Emisi\ GRK = \frac{Emisi\ GRK_{(n)} - Emisi\ GRK_{(n-1)}}{Emisi\ GRK_{(n-1)}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Baplitbangda (Aplikasi Aksara)						

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 25



LAMPIRAN II:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

1. DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan masyarakat yang berpendidikan berdaya saing dan	Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ Ket: RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun}} \times 100$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun}} \times 100$	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
2	Meningkatkan pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	$\frac{\text{Jumlah Warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Warisan budaya yang ada}} \times 100$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ada}} \times 100$	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
3	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Pendidikan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Pendidikan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pendidikan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

2. DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack	Dinas Kesehatan	BPS
	Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas	Angka Kesakitan	$\frac{\text{Jumlah total penyakit di suatu wilayah tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P)	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	<div><div><div><div><div>$AKB = \frac{D_{0-<1th} \times 1000}{\Sigma \text{ Lahir Hidup}}$</div></div></div><div><div>Dimana:</div><div>AKB</div><div>$D_{0-<1th}$</div><div>Σlahir hidup</div></div></div><div><div>= Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)</div><div>= Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu di daerah tertentu.</div><div>= Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu di daerah tertentu</div></div></div>	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Persentase Penerapan RT Ber – PHBS	$\frac{\text{Jumlah RT Ber PHBS}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan	$\frac{\text{Total nilai persepsi dari seluruh responden}}{\text{Total unsur yang terisi dari seluruh responden}} \times 25$	RSU	RSU

NO	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Re-akreditasi	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas Re Akreditasi}}{\text{jumlah seluruh puskesmas}} \times 100\%$	Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit}}{(\text{jumlah tempat tidur} \times \text{jumlah hari dalam satu periode})} \times 100\%$	RSU	Rumah Sakit Umum
		Average Length Of Stay (AVLOS)	$\frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
		Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
		Turn Over Interval (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{Jumlah Hari Perawatan}}{\text{jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$	RSU	Rumah Sakit Umum
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Kesehatan	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Kesehatan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kapasitas Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	<div> $\beta = ev$ $\beta = \text{Indeks Konektivitas}$ $e = \text{banyaknya jalan}$ $v = \text{banyaknya kota}$ </div>	Bidang Bina Marga	PUTR Kota Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas jalan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik} + \text{panjang jalan kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang wilayah	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Persetujuan KKPR (kesesuaian pemanfaatan Ruang) non berusaha} + \text{jumlah rekomendasi IMB}}{\text{Jumlah usulan rekomendasi persetujuan KKPR (kesesuaian pemanfaatn ruang) non berusaha} + \text{jumlah usulan IMB}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang	
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam IMB	Rasio kepatuhan IMB	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi IMB}}{\text{Jumlah usulan IMB}} \times 100\%$		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas PUTR	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan	Tingkat capaian indikator sasaran daerah	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas PUTR

4. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Nyaman	Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Nyaman	$\frac{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditangani}}{\text{Jumlah Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik	0,5 (Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan) + 0,5 (Persentase PJU)	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Meminimalisir konflik sengketa lahan	Persentase lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah lahan yang tersertifikasi}}{\text{Jumlah persil lahan Kota Padangsidimpuan}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidimpuan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perumahan dan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padangsidempuan	Kawasan Permukiman Kota Padangsidempuan			Padangsidempuan

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatan Keamanan Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Layanan terhadap Masyarakat yang terdampak Gangguan Ketentrman dan Ketertiban umum serta Penegakan Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 (Ketentrman, Ketertiban, Keindahan) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 (Ketentrman, Ketertiban, dan Keindahan) yang dilaporkan masyarakat dan petugas}} \times 100\%$	Bidang Tribum dan Bidang PPUD	Satpol PP
	Meningkatnya upaya Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketentrman Umum	Persentase Penegakan Perda/Perkada dan Penyelesaian Gangguan Ketertiban dan Ketentrman Umum	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan masyarakat dan petugas}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Satpol PP	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimp uan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja	Capaian indikator sasaran	Satpol PP	Satpol PP

6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas penanganan kebakaran	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap		Bidang Pemadam	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		(response time rate) penanganan kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah kasus kebakaran}} \times 100\%$		Penyelamatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Tim Tanggap Darurat Kebakaran pada bangunan Gedung dan Industri 4. Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan/atau pengelola lingkungan lainnya 5. Satuan relawan kebaran
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran serta kondisi membahayakan manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	$\frac{\text{Jumlah layanan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah kasus evakuasi kebakaran}} \times 100\%$	Bidang Pemadam	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan
		Persentase pelayanan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)	$\frac{\text{Jumlah layanan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia}}{\text{Jumlah kasus evakuasi pada kondisi membahayakan manusia}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamtan	Rata-rata capaian indikator sasaran	Sekretariat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Padangsidimpuan

7. DINAS SOSIAL KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan PPKS	Persentase Penurunan PPKS	$\frac{Jumlah\ KPM\ Graduasi}{Jumlah\ Penerima\ Bansos\ Bersyarat} \times 100\%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya kuantitas penanganan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{Jumlah\ PPKS\ yang\ tertangani}{Jumlah\ PPKS\ yang\ ada} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Meningkatnya Layanan Yang Berkualitas Oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial	$\frac{IPS\ Perorangan + IPS\ Lembaga}{2}$	Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Dinas Sosial	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Sosial	Tingkat capaian Indikator sasaran Dinas Sosial	$\frac{Akumulasi\ Capaian\ Sasaran}{Jumlah\ Total\ Sasaran} \times 100\%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Resiko Dan Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	<div> $R \approx H * \frac{V}{C}$ <p>Dimana :</p> <p>R = Tingkat Resiko Bencana</p> <p>H = Indeks Bahaya</p> <p>V = Indeks Kerentanan</p> <p>C = Indeks Kapasitas</p> </div>	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BNPB Penilai IRB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Penanganan Bencana Daerah	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	$\frac{Jumlah\ Desa/Kelurahan}{jumlah\ desa\ tangguh} \times 100\%$		BPBD Padangsidempuan
		Rata-Rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Bencana Alam	Lama waktu menuju ke lokasi bencana	Bidang Kedaruratan Logistik	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana Yang Sesuai Standa Kelayakan Dan Keselamatan	$\frac{Jumlah\ daerah\ dampak\ bencana}{Jumlah\ bencana\ di\ tangani} \times 100\%$	Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP BPBD Kota Padangsidempuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kulaitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	$\frac{Akumulasi\ Capaian\ Sasaran}{Jumlah\ Total\ Sasaran} \times 100\%$		BPBD Padangsidempuan

9. DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja	$\frac{Jumlah\ Orang\ Bekerja}{Jumlah\ Penduduk} \times 100\%$	Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
	Meningkatnya peluang kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{Jumlah\ Orang\ Bekerja}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} \times 100\%$		
2	Terciptanya hubungan Industrial yang harmonis	Persentase Penyelesaian kasus hubungan Industrial	$\frac{Jumlah\ Perselisihan\ yang\ tertangani}{Jumlah\ perselisihan\ di\ daerah\ kota} \times 100\%$	Bidang Pendataan dan	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak}}{\text{Jumlah total perusahaan}} \times 100\%$	Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan	
3	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Ketenagakerjaan	Nilai SAKIP Dinas Ketenagakerjaan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah Dinas Ketenagakerjaan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Ketenagakerjaan

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{1}{3} [X_{\text{de}}(1) + X_{\text{de}}(2) + \text{Linc-Dist}]$ $X_{\text{de}}(1)$ = Xede untuk harapan hidup $X_{\text{de}}(2)$ = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	Bidang Pemberdayaan Perempuan	BPS; Disnaker; Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>IDG = 1/3 (Ipar +IDM+Lin-Dist) dimana, Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen (DPRD) IDM =Indeks pengambilan keputusan Lin-Dist = Indeks distribusi pendapatan Keterwakilan di parlemen = Proporsi keterwakilan di Parlemen laki-laki dan perempuan Pengambilan Keputusan = Proporsi dari manager, Staf Administrasi, pekerja profesional dan teknisi laki-laki dan perempuan Distribusi Pendapatan = Upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan</p>		
2	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah korban yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi}} \times 100\%$	PP PA	UPT PPA
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Ratio Perempuan korban kekerasan per 10.000 termasuk TPPO (usia 18 Tahun ke atas)	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan}}{\text{Jumlah perempuan usia 18 tahun ke atas}} \times 10.000$		UPT PPA; UPPA Polres
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Ratio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 10.000 anak (0–18 Tahun)	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah anak (0 – 18 tahun)}} \times 10.000$		
3	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	<u>Aspek PHA</u>	Bidang Perlindungan Anak	Kementerian PP PA
	Meningkatnya kondisi pembangunan yang berpihak pada anak	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak	Penilaian Tim dari Kementerian PP dan PA terhadap 24 Indikator Kota Layak Anak		Kementerian PP PA

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas PP PA	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	PP PA	Inspektorat Kota
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas PP PA	Tingkat Capaian Indikator Sasaran	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	PP PA	Dinas PP PA

11. DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemandirian Pangan di Kota Padangsidempuan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	<div> $Y(j) = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij}$ </div> <div> <p>Dimana:</p> <div> <div> <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>j</i> : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j </div> <div> <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-i <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j </div> </div> </div>	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Daerah	Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH : % AKE x Bobot Skor PPH : Skor Pola Pangan Harapan % AKR : Persentase Angka Kecukupan Energi Bobot : Bobot setiap golongan bahan pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Ketahanan Pangan

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (IKA.30%) + (IKU.30%) + (ITH.40%)	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	Kementrian LHK
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	$Ipj = \sqrt{(Ci/Lij)^2M+(Ci/Lij)^2R}$ <u>Ket:</u> - Ci / Lij M = nilai maksimum dari Ci / Lij - Ci / Lij R = nilai rata -rata dari Ci/Lij	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara = 100 - {50/0,9 x (ieu-0,1)} Keterangan: - Ieu = rata-rata (SO ₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO ₂ Ref EU dan NO ₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO ₂ Ref EU)		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	ITH = 100 - ((84,3-(THx100)) x 50/54,3 Keterangan: - ITH = Indeks Tutupan Hutan - TH = Tutupan Hutan		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan	Tingkat Sasaran Capaian Dinas Ketahanan Pangan	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran		Dinas Ketahanan Pangan

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur \times Nilai\ Penimbang$	Bidang Inovasi	Disdukcapil Kota Padangsidempuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dokumen	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang sudah memiliki dokumen kependudukan dn pencatatan sipil}}{\text{Jumlah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dirjend Dukcapil Kemendagri
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Dinas dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian Indikator Sasaran		Disdukcapil Kota Padangsidempuan

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pembangunan wilayah perdesaan	Indeks Desa Membangun	$I_x = \frac{\sum_1^n skor\ x}{n_x \times 5}$ <p>I_x = Indeks n = Jumlah Indikator</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
	Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Maju	$\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Dinas PMD
		Persentase BUMDES yang berkontribusi terhadap pendapatan Asli Desa	$\frac{\text{Jumlah BUMDES Aktif}}{\text{Jumlah BUMDES}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan	Dinas PMD
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

15. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Tujuan Taraf Hidup Keluarga	Persentase Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera	$\frac{Jumlah\ Keluarga\ Kategori\ Pra\ Sejahtera}{Jumlah\ Keluarga\ Sejahtera} \times 100\%$	DPPKB	DPPKB
	Meningkatkan Kualitas Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	$TFR = 5 \sum I = 1 ASFR\ i$	Bidang Pengendalian Penduduk	Data BKKBN
	Meningkatnya Perencanaan Keluarga	Persentase peserta KB aktif	$\frac{ASFR = bi/Pif \times K}{\frac{Capaian\ MKJP}{PA}} \times 100\%$	Bidang Pembina Keluarga Berencana	Data BKKBN
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas kinerja pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	$\frac{Akumulasi\ Capaian\ Sasaran}{Jumlah\ Total\ Sasaran} \times 100\%$		DPPKB

16. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3		5	6
1	Meningkatkan Kapasitas	Indeks Konektivitas	<div> $\beta = \frac{e}{v}$ <p>β = Indeks Konektivitas e = banyaknya jalan v = banyaknya kota</p> </div>	Bidang lalu lintas	Dishub; PUTR Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Konektivitas Wilayah	Wilayah		dan angkutan jalan	Padangsidimpuan
	Meningkatkan kualitas jalan	Persentase Fasilitas dan Perlengkapan Jalan	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang prasarana dan sarana	Dishub
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat Dishub	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Perhubungan	Capaian Indikator Sasaran		Dishub

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik	<div> $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ </div> <div> <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j. </div>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Berdasarkan kriteria penilaian dari aplikasi evaluasi SPBE dari Kemenpan RB
	Meningkatnya layanan Publik Berbasis IT	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Pemanfaatan IT pada Penyelenggaraan	Persentase OPD yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Diskominfo		Bidang Prasarana dan Sarana Komunikasi	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Pemerintah		$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Kominfo}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Keamanan Dokumen Negara	Persentase dokumen yang telah menggunakan sandi dalam keamanan komunikasi perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Validitas Data dan Informasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase data dan informasi pembangunan yang tersedia dan terupdate	$\frac{\text{Jumlah OPD yang mengupdate data pembangunan}}{\text{Jumlah total OPD}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Informasi	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan	Tingkat Capaian indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran Investasi Daerah dalam pembangunan Perekonomian	Persentase Peningkatan Investasi Daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai investasi tahun berkenan} - \text{jumlah nilai investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah nilai investasi tahun lalu}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padangsidempuan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi tahun berkenan		
2	Meningkatkan Akuntabilitas	Nilai SAKIP Dinas	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Padangsidimpuan		Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tingkat Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

19. DINAS PERPUSTAKAAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$IPLM = \frac{\sum UPLM}{AM} \times 100$ <p> IPLM = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat keperpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan AM = Aspek Masyarakat </p>	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
	Meningkatnya minat baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Diukur menggunakan survey / kajian kegemaran membaca Masyarakat		
2	Meningkatkan kapasitas kearsipan daerah	Indeks Pengawasan Kearsipan	Berdasarkan penilaian dari ANRI	Bidang Arsip	
	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan	Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat Perpustakaan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas Kinerja perencanaan Pembangunan Dinas Perpustakaan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Perpustakaan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Perpustakaan

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan dan Mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter	Persentase pemuda yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30) tahun di Kota Padangsidempuan}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolaharagaan	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
	Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kepeloporan, Kepramukaan, kepemimpinan dan kewirausahaan	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kepeloporan, kepramukaan, kepemimpinan dan kewirausahaan}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16 – 30) tahun di Kota Padangsidempuan}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan	
2	Meningkatkan Kapasitas Keolahragaan Daerah	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	$\frac{\text{Jumlah medali tahun } n - \text{jumlah medali tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah medali tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Keolahragaan	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap atlit yang dikirim	$\frac{\text{Jumlah perolehan medali tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang dikirim}} \times 100\%$		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	$\frac{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } n - \text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah PAD sektor pariwisata tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } (n - 1)} \times 100\%$		
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan	Nilai SAKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan	Tingkat capaian indikator sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padangsidempuan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

21. DINAS PERTANIAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pertumbuhan Komoditas Pertanian dan Perikanan	LPE Sub Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Hasil Perhitungan dari BPS	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Bidang Perikanan	BPS
	Meningkatnya mutu dan produksi pertanian dan perikanan	Produktivitas Pertanian	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian tahun } n}{\text{Luas lahan tahun } n} \times 100\%$	Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Bidang Sarana dan Prasarana	Dinas Pertanian
		Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan tahun n	Bidang Perikanan	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian	Nilai SAKIP Dinas Pertanian Kota Padangsidempuan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Dinas Pertanian	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Pertanian	Capaian Indikator Sasaran		Dinas Pertanian

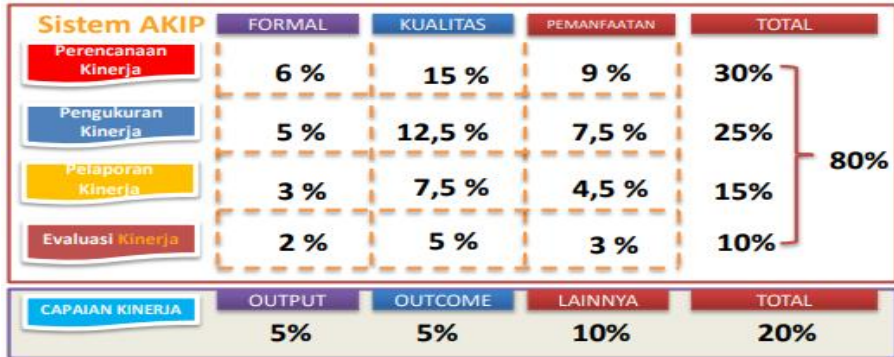
22. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{PDRB\ tahun\ (n) - PDRB\ tahun\ (n - 1)}{PDRB\ tahun\ (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun n		
2	Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	$\frac{Jumlah\ IKM\ yang\ naik\ skala\ usahanya}{Jumlah\ IKM\ di\ Kota\ Padangsidimpuan} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	
	Meningkatnya Partisipasi IKM dalam Perekonomian Daerah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Aktif	$\frac{Jumlah\ IKM\ yang\ aktif}{Jumlah\ seluruh\ IKM} \times 100\%$		
3	Meningkatnya Kapasitas UMKM Daerah	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	$\frac{Jumlah\ UMKM\ yang\ naik\ skala\ usahanya}{Jumlah\ UMKM\ di\ Kota\ Padangsidimpuan} \times 100\%$	Bidang Koperasi UMKM	
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Usaha kecil Menengah Baru	$\frac{Jumlah\ UKM\ tahun\ (n) - Jumlah\ UKM\ tahun\ (n - 1)}{Jumlah\ UKM\ tahun\ (n - 1)} \times 100\%$		
	Optimalisasi Kinerja Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Persentase Koperasi yang Aktif	$\frac{Jumlah\ Koperasi\ Aktif}{Jumlah\ Seluruh\ Koperasi} \times 100\%$		
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Dearah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	dan Perdagangan				
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$	Sekretariat	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

23. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemenpan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Hasil Survei

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																									
1	2	3	4	5	6																									
			IKM Unit Pelayanan x 25																											
			<table><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00-2,5996</td><td>25,00-64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60-3,064</td><td>65,00-76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644-3,532</td><td>76,6-88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324-4,00</td><td>88,31-100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644-3,532	76,6-88,30	B	Baik	4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik
			Nilai Persepsi			Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
			1			1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																					
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644-3,532	76,6-88,30	B	Baik																										
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik																										
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kota Padangsidimpuan		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kemenpan																										
Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD (rekomendasi indikator tujuan perangkat daerah)	<table><tr><th>No.</th><th>Skor kinerja</th><th>Status Kinerja</th></tr><tr><td>1.</td><td>1.00-1.80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>2.</td><td>1.81-2.60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>3.</td><td>2.61-3.40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4.</td><td>3.41-4.20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5.</td><td>4.21-5.00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table>	No.	Skor kinerja	Status Kinerja	1.	1.00-1.80	Sangat Rendah	2.	1.81-2.60	Rendah	3.	2.61-3.40	Sedang	4.	3.41-4.20	Tinggi	5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Kemendagri								
No.	Skor kinerja	Status Kinerja																												
1.	1.00-1.80	Sangat Rendah																												
2.	1.81-2.60	Rendah																												
3.	2.61-3.40	Sedang																												
4.	3.41-4.20	Tinggi																												
5.	4.21-5.00	Sangat Tinggi																												
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretariat Daerah	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan																									
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Sekretariat Daerah	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Sekretariat Daerah	$\frac{Akumulasi\ Capaian\ Sasaran}{Jumlah\ Total\ Sasaran} \times 100\%$		Sekretariat Daerah																									

24. SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kinerja DPRD	Indeks kepuasan anggota dewan terhadap layanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey Kepuasan DPRD</p> <p>Rumus indeks =</p> <div>$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = \underline{\underline{N}}$</div> <p>N = bobot nilai per unsur</p> <p>Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan DPRD unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :</p> <div>$\text{Indeks Kepuasan DPRD} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$</div> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian indeks kepuasan DPRD yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :</p> <div>$\text{Indeks Kepuasan DPRD unit pelayanan} \times 25$</div> <p>IKM Pelayanan :</p> <p>A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00 </p> <p>B (Baik) : 76,61 – 88,30</p> <p>C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60</p> <p>D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99</p>	Bagian Persidangan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya layanan/dukungan terhadap penyelesaian produk hukum oleh DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan dari Ranperda	$\frac{\text{Jumlah Perdaya yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Ranperda}} \times 100\%$	Bagian Persidangan	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat DPRD	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Sekretariat DPRD	Tingkat capaian indikator sasaran Sekretariat DPRD	Capaian Indikator Sasaran		Sekretariat DPRD

25. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan kelurahan	Persentase Kelurahan yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$	Sekretaris Kecamatan	
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretaris Kecamatan	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Utara	Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Padangsidimpuan Utara	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

26. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$	Sekretaris Camat	Kecamatan
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Padangsidimpuan selatan	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	Tingkat capaian indikator sasaran daerah Kecamatan Padangsidimpuan Selatan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

27. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	
	Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur perangkat desa dan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidempuan Tenggara	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidempuan Tenggara	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidempuan Tenggara	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

28. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kel/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur perangkat desa dan tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidempuan Batunadua	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan.	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidempuan Batunadua	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidempuan Batunadua	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

29. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase kelurahan/desa yang berpartisipasi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pada Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan/Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru	Nilai SAKIP	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru	Tingkat capaian indikator sasaran Kantor Camat Padangsidempuan Hutaimbaru	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

30. KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Kasi Pelayanan	Kemenpan
	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase Desa yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Jumlah Kelurahan/desa di kecamatan}} \times 100\%$		Kecamatan
	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan yang aktif}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan & Kemasyarakatan	
	meningkatnya kualitas dan sumber daya manusia seluruh aparatur desa dan tata kelola pemerintah desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	$\frac{\text{Jumlah desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah desa di kecamatan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	Nilai SAKIP Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	Sekretaris Camat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	Tingkat capaian indikator sasaran Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Kecamatan

31. INSPEKTORAT KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Maturitas SPIP	Penilaian dari BPKP	Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan	BPKP
	Maningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP	Penilaian dari BPKP		

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Penanganan Resiko yang Menghambat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Manajemen Resiko	Penilaian dari BPKP		Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan		
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		

32. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan (Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja)	Rata-rata Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja dari Kemenpan RB	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kemenpan RB
	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan RB		
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Hasil Penilaian SAKIP dari Kemenpan RB		
	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator sasaran daerah	(= Akumulasi Capaian Indikator Sasaran Daerah / Total Jumlah Indikator Sasaran Daerah) x 100		Baplitbangda

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	(= Jumlah hasil penelitian yang di manfaatkan / Jumlah hasil penelitian yang di publikasikan) x 100		
		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Indeks Inovasi dari Kemendagri		Kemendagri
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Baplitbangda	Nilai SAKIP Baplitbangda	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Baplitbangda	Tingkat capaian indikator sasaran Baplitbangda	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		Baplitbangda

33. BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fisikal Otonomi Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Pendapatan	BPKPD
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{Pendapatan tahun (n)} - \text{Pendapatan tahun (n - 1)}}{\text{Pendapatan tahun (n - 1)}} \times 100\%$		
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Bidang Akuntansi	
	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	$\frac{\text{Parameter}}{\text{Sub Parameter}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan BMD	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan	Persentase Penyusunan APBD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Penyesuaian APBD sesuai atau tidak sesuai peraturan}}{\text{Penyusunan APBD sesuai atau tidak sesuai peraturan}} \times 100\%$	Bidang Anggaran	
		Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang akurat dan sesuai standar	$\frac{\text{Pengelolaan kas daerah sesuai atau tidak sesuai standar}}{\text{Pengelolaan kas daerah sesuai atau tidak sesuai standar}} \times 100\%$	Bidang Perbendaharaan	
		Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu	$\frac{\text{Laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai SAP}}{\text{Laporan keuangan sesuai atau tidak sesuai SAP}} \times 100\%$	Bidang Akuntansi	

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPD	Nilai SAKIP BPKPD	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan	Sekretariat	Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan BPKPD	Tingkat Capaian Indikator Sasaran BPKPD	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		BPKPD

34. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANGSIDIMPUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Capaian Penerapan Merit sistem	Indeks Merit Sistem	<i>Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator × Nilai masing – masing jawaban indikator</i>	BKPSDM	BKPSDM
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian	Persentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah aparatur yang mengusulkan pelayanan administrasi kepegawaian}} \times 100\%$		
		Persentase kesesuaian Kompetensi Pejabat Struktural dengan jabatan/tupoksi yang dijalankan	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya}}{\text{Jumlah seluruh jabatan struktural}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	<i>Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator × Nilai masing – masing jawaban indikator</i>		
	Meningkatnya Kompetensi Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	$\frac{\text{Jumlah ASN yang terpenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya}}{\text{Jumlah ASN (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$		
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah BKPSDM	Nilai SAKIP BKPSDM	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan BKPSDM	Tingkat Capaian Indikator Sasaran BKPSDM	$\frac{\text{Akumulasi Capaian Sasaran}}{\text{Jumlah Total Sasaran}} \times 100\%$		BKPSDM

35. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Stabilitas IPOLEKSOSBUD HAMKAM Daerah	Persentase Konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah laporan konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total laporan konflik Ipoleksosbud, Hukum dan HAM}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Target Laporan Potensi Konflik Sosial - Jumlah yang Terrealisasikan Laporan Potensi Konflik Sosial} \times 12 \text{ Bulan} \times 100\%}{\text{Jumlah laporan konflik Ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan}} \times 100\%$		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padangsidimpuan	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan hasil penilaian Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan		Inspektorat Daerah Kota Padangsidimpuan
	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat Capaian Indikator Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian indikator sasaran		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pj. Wali Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Timur Tumanggor

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 19 Juni 2024

Sekretaris Daerah
Kota Padangsidimpuan,

Ttd.

Letnan

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024 NOMOR 25

